

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

Reskino

Rini

Dinda Novitasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

reskino.uin@gmail.com

Abstract

This research aims to test university accounting students perception in tax evasion, which the respondents in this research were undergraduate and graduate accounting students in Jakarta. Total sample of this research was 121 respondents. The determination method sample that used is purposive sampling with judgement sampling, to test the hypothesis in this research. Researchers use different independent sample t-test. This research shows that there is no different perception between undergraduate and graduate accounting students in terms of tax evasion.

Keywords: perception, tax and tax evasion.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program Magister Akuntansi tentang penggelapan pajak. Topik penggelapan pajak merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan apalagi sejak adanya kasus Gayus yang sangat menghebohkan dunia perpajakan. Penggelapan pajak bisa timbul akibat pengelolaan pajak yang kurang baik. Begitu juga dengan Target penerimaan negara terlalu besar akan mengakibatkan beban pencapaian target yang diemban petugas pajak menjadi beban psikologis sehingga dikhawatirkan dapat memicu tindakan yang menyimpang. Target penerimaan negara yang tinggi memicu banyaknya manipulasi dalam pembayaran pajak terutama oleh para satuan kerja di pemerintahan sehingga membuat penerimaan pajak tidak maksimal.

Mughal (2012) menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat digambarkan sebagai kegiatan wajib pajak di mana mereka tidak patuh dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

Hal yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan (Ika, 2012).

Menurut Wallschutzky dalam Nurmantu (2004) dalam Made Arie Wahyuni sebab-sebab WP melakukan *tax evasion* adalah: (1) WP berpersepsi tentang: (a) Tarif pajak terlalu tinggi; (b) Sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang; (c) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak; (2) Kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum yang berlaku; (3) Perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga mempengaruhi individu tersebut melakukan *tax evasion*; (4) *Tax audit*, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak; (5) Administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh *tax payer*; (6)

Praktisi pajak; (7) Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah; dan (8) *Servis* dari Wajib Pajak yang kurang dinikmati.

Mughal (2012) melakukan penelitian di 72 kota di Pakistan untuk mengetahui alasan wajib pajak menghindari atau menggelapkan pajak. Menurut Mughal ada 10 (sepuluh) alasan orang melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (*tax evasion*), diantaranya tidak adanya moralitas pajak, tarif pajak yang tinggi, buta penghitungan pajak, kurangnya penegak hukum, kurangnya insentif pajak, sistem pajak yang kurang adil dan efisien, tidak adanya sosialisasi, kurangnya hubungan antara wajib pajak dan pemerintah, kemiskinan, dan proliferasi pajak.

Penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan oknum petugas pajak yang mengecewakan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme akuntan menurun.

Menurut Adam (1993) Orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Mereka menggelapkan pajak karena hal itu dianggap mungkin untuk melakukannya berkaitan dengan situasi etika. Di lain hal orang menggelapkan pajak dan berusaha membenarkannya atas dasar moral. Melalui penelitian Crowe (1944) yang telah menjadi literatur selama 500 abad yang lalu, ingin diketahui perbedaan perspektif setiap orang yang berada dalam suatu lingkungan dari populasi atau sampel yang ada, yang menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah suatu yang beretika/dapat dibenarkan, tidak beretika/tidak dapat dibenarkan, maupun kadang-kadang yang berpandangan bahwa perbuatan tersebut termasuk sebagai tindakan yang beretika/kadang-kadang dapat dibenarkan.

Cohn (1998) dalam McGee, et. al., (2008) memeriksa literatur Yahudi dan menyimpulkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain. Jika seorang Yahudi melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), hal itu akan membuat semua orang Yahudi lainnya terlihat buruk.

McGee, et. al., (2008) meneliti penggelapan pajak (*tax evasion*) melalui persepsi dari dua budaya yang berbeda, yaitu pada mahasiswa bisnis di Hong Kong dan Amerika Serikat. Baik mahasiswa di Hong Kong maupun Amerika Serikat menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis/dibenarkan. Terkadang penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang etis tergantung pada keadaan. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah atas dasar moral yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, adanya korupsi oleh pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak. Penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa di Amerika Serikat lebih menentang penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan mahasiswa di Hong Kong.

Musaibah, et. al., (2012) meneliti perbedaan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akuntansi, bisnis, dan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk salah satu dari 18 pertanyaan yang diajukan. Hasil daristudi menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis dalam kondisi tertentu. Mayoritas responden menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) selalu atau hampir selalu etis. Responden membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai praktek etis jika sistem pajak tidak adil, pemerintah korup, boros, atau jika pemerintah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Argumen paling lemah adalah dalam kasus penggelapan pajak (*tax*

evasion) saat ini dilihat dari perspektif Islam. Sebagai Muslim, penggelapan pajak (*tax evasion*) tidak dapat dibenarkan.

Hal senada juga ditemukan oleh Sigit Prasetyo yang meneliti tentang “persepsi etis penggelapan pajak bagi wajib pajak” yang mengambil sampel di wilayah Surakarta menemukan hasil bahwa 85,74% pegawai swasta tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak; 82,13% wiraswasta tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak; dan 95,56% pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak. Artinya tidak satupun yang setuju dengan penggelapan pajak.

Penelitian lainnya yang juga meneliti masalah penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penelitian yang dilakukan oleh Kirchler, Maciejovsky, dan Schneider (2001) dalam penelitian yang berjudul “*Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter?*”. Penelitian dilakukan pada 252 responden yang terdiri dari petugas pajak, mahasiswa bisnis, pengacara bisnis, dan pengusaha. Hasil penelitian menunjukkan pendapat yang berbeda-beda dari berbagai kelompok responden. Dibandingkan dengan mahasiswa bisnis, pengacara bisnis, dan pengusaha, petugas pajak menilai ketiga bentuk pengurangan pajak di atas (*tax avoidance, tax evasion, and tax flight*) tidak adil, bagi pengusaha pengurangan pajak dalam bentuk *tax flight* lebih adil dibandingkan *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Hubungan antara tingkat pendidikan dan penggelapan pajak (*tax evasion*) masih belum jelas. Berbeda dengan penelitian tentang hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan pajak yang telah banyak dilakukan sebelumnya. Wallschutzky (1984), dalam Ross dan McGee, 2012) menemukan hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan pajak, yang berarti bahwa jika tingkat pendidikan seseorang meningkat, maka tingkat kepatuhan juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Groenland & vanVeldhoven (1983, dalam Ross dan McGee, 2012) menyatakan meningkatnya pendidikan akan menurunkan tingkat kepatuhan seseorang terhadap pajak.

Ross dan McGee (2012) melakukan penelitian di Brazil, Rusian, India, Cina, AS dan Jerman. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pandangan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) secara demografis. Hasil analisis menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak membuat perbedaan dalam sikap seseorang terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), seperti halnya jenis kelamin dan usia dalam beberapa kasus.

Penggelapan pajak di Indonesia masih banyak dilakukan. Contoh kasus penggelapan pajak: (1) Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya; (2) Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebaskan biaya fiktif; (3) Transaksi *export* fiktif; dan (4) Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum secara keseluruhan. Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang ‘paling sedikit’ namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku (Wahyuni)

Nickerson, et. al., (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam kondisi tertentu. Selain itu,

penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia dan di mana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan perspektif mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengetahui apakah ada perbedaan perspektif antara mahasiswa akuntansi program S1 dengan mahasiswa akuntansi program S2 (Magister Akuntansi) mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Dasar pengambilan sampel tersebut, dikarenakan pada dasarnya kedua sampel dianggap telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat lebih meredam perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) karena tantangan dalam mengumpulkan pajak ke depan semakin besar mengingat praktik-praktik penyelewengan terhadap kewajiban membayar pajak semakin beragam. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “*Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 (Magister Akuntansi) mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program Magister Akuntansi.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Andercon, penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan Pajak. Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak (*tax evasion*) ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Mardiasmo, 2009).

Penghindaran pajak termasuk dalam pengertian perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan sebaliknya diperoleh penghematan (*tax saving*) dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan illegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut.

Hal serupa dinyatakan oleh Kirchler, et. al. (2001), dalam penelitiannya, bahwa meskipun ada kesamaan antara penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penggelapan pajak (*tax avoidance*) dalam mengurangi

pendapatan, namun penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap negatif/ilegal dan tidak bermoral, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap lebih positif dan bermoral terkait dengan niat untuk menghemat pajak dengan tata cara yang benar.

Keterkaitan Antar Variabel Dan Hipotesis

Berulangnya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) menandakan sistem pengawasan di tingkat institusi masih lemah. Di sisi lain, kasus yang muncul akhir-akhir ini sebenarnya justru lebih banyak dipengaruhi oleh kelalaian individu. Mahasiswa akuntansi yang telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai perpajakan diharapkan dapat menjadi individu yang lebih beretika dalam menyikapi penggelapan pajak (*tax evasion*), untuk itu peneliti mencoba meneliti bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini didukung oleh penelitian McGee et. al., (2008) tentang persepsi etis mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada mahasiswa bisnis di Hong Kong dan Amerika Serikat. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa di Hong Kong dan Amerika Serikat. Mahasiswa di Amerika Serikat lebih memperhatikan nilai-nilai moral terlepas dari apa yang orang lain kerjakan, mereka menganggap penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tidak etis sekalipun pemerintah tidak menggunakan dana pajak dengan baik. Berbeda dengan mahasiswa di Hong Kong, mereka cenderung membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) jika apa yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan yang diharapkannya.

Musaibah, et. al., (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa akuntansi, administrasi bisnis, dan keuangan di Yaman mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Berbeda dengan penelitian Smith dan McGee (2006) yang menyatakan bahwa mahasiswa bisnis lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akuntansi.

Wallschutzky (1984, dalam Ross dan McGee, 2012) menemukan hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan pajak, yang berarti bahwa jika tingkat pendidikan seseorang meningkat, maka tingkatkepatuhanjuga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Groenland & vanVeldhoven (1983, dalam Ross dan McGee, 2012) menyatakan meningkatnya pendidikan akan menurunkan tingkat kepatuhan seseorang terhadap pajak.

Ross dan McGee (2012) melakukan penelitian di enam negara yang membahas tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku etis penggelapan pajak (*tax evasion*). Sebuah perbandingan hubungan antara tingkat pendidikan dan sikap terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) di enam negara menghasilkan hasil yang beragam. Sampel data di Brazil, Rusia, dan Cina menunjukkan kelompok yang kurang berpendidikan atau yang tidak memiliki pendidikan formal cenderung menentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Di India dan Amerika Serikat, kelompok yang paling menentang penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah kelompok dengan tingkat pendidikan universitas atau kelompok dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Sedangkan data untuk sampel Jerman menunjukkan kelompok dengan pendidikan dasar yang kurang dan kelompok universitas adalah dua kelompok yang paling menentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

Mughal (2012) dalam penelitiannya menyatakan ada 10 (sepuluh) alasan wajib pajak di Pakistan menggelapkan pajaknya. Mughal juga memberi peringkat lima teratas alasan wajib pajak menghindari atau menggelapkan pajak, diantaranya tidak ada sosialisasi pajak, kurangnya insentif pajak yang memadai, kurangnya hubungan pembayar pajak dan pemerintah, alokasi pajak yang tidak merata, dan buta penghitungan pajak

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha : Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi

program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 (Magister Akuntansi).

METODE PENELITIAN

Metode Penentuan Sampel

Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan *purposive sampling* dengan jenis *judgement sampling* (pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan yang kriteria respondennya, antara lain:

1. Mahasiswa akuntansi program S1 semester lima keatas dan telah mengambil mata kuliah perpajakan dan hukum pajak. Bagi mahasiswa akuntansi program S2 (Magister Akuntansi) tidak ada batasan semester.
2. Masing-masing wilayah di Jakarta memiliki perwakilan untuk dijadikan sampel, minimal satu universitas di masing-masing wilayah.

Kriteria ini dipilih karena mahasiswa akuntansi yang telah mengambil mata kuliah perpajakan dan hukum pajak dianggap telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Dan kriteria perwakilan minimal satu universitas di masing-masing wilayah di Jakarta dipilih dengan tujuan agar hasil analisis data berdasarkan sampel dapat digeneralisasi pada tingkat populasinya.

Metode Pengumpulan Data

Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner dengan penelitian langsung ke beberapa universitas yang ada di Jakarta. Pengiriman kuesioner dilakukan sendiri oleh peneliti dengan tujuan agar tingkat pengembalian (*response rate*) kuesioner bisa lebih tinggi. Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2, Ragu-Ragu (R) diberi nilai 3, Setuju (S) diberi nilai 4, dan Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5. Skala Likert dikatakan interval karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat atau

preferensi yang "lebih tinggi" dari setuju dan setuju "lebih tinggi" dari ragu-ragu.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang telah dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2009).

Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah suatu data penelitian dengan menggunakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa proses pengolahan data penelitian dengan analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Pengolahan data penelitian ini menggunakan *software Microsoft Office Excel 2007*. Data yang terkumpul melalui dokumen dan wawancara kemudian dianalisis untuk mengetahui maksud dan maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian.

Indikator Penelitian

1. Sistem pajak adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Menurut Nickerson (2009) sistem pajak mencakup tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.
2. Keadilan pajak dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

3. Diskriminasi menurut Nickerson (2009) dapat mengakibatkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam kondisi tertentu, dimana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Diskriminasi pajak dapat merusak keadilan dalam perpajakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa akuntansi yang berada di wilayah Jakarta. Objek penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi program S1 dan program S2 pada beberapa Universitas di Jakarta. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden. Kuesioner disebarikan kepada 121 responden. Dari 121 responden tersebut yang mengembalikan kuesioner sebanyak 121 responden, semua hasil kuesioner diolah.

Analisis Deskriptif

Pada tabel 2 (lampiran), hasil peringkat nilai rata-rata dari 15 pernyataan mulai dari yang terkecil hingga terbesar untuk dapat mengetahui manakah pernyataan yang menjadi perspektif bagi para responden yang dinilai paling sesuai dengan kondisi untuk melakukan penggelapan pajak atau menentang penggelapan pajak.

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa pernyataan yang paling disetujui atau dipandang sebagai pernyataan yang paling sesuai apabila terjadi tindakan penggelapan pajak adalah ketika sistem pajak berjalan tidak adil dan tidak efisien (dengan nilai rata-rata 2.661). Hal tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 di Jakarta berpandangan bahwa apabila

didalam sistem perpajakan memang tidak bisa diandalkan dalam mengatur perihal pemungutan pajak dan pengelolaannya maka wajar atau beretika jika masyarakat melakukan penggelapan pajak. Alasan lain responden beranggapan bahwa penggelapan pajak adalah etis apabila otoritas pajak yang ada kurang memadai, masyarakat tidak mampu untuk membayar pajak, dan jika sebagian besar porsi dari pajak yang dikumpulkan dipergunakan secara tidak merata, misalnya masih banyak daerah-daerah yang tidak merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak, hal ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan suatu negara pada masyarakatnya untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemerdekaan bagi setiap warganya.

Pada tabel 2 terlihat bahwa walaupun orang lain melakukan penggelapan pajak dan tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi (dengan rata-rata terkecil, yaitu 2.099 dan 2.132), bukanlah alasan bagi seseorang untuk membenarkan penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian McGee et. al., (2008) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak yang dilakukan orang lain dan tarif pajak yang terlalu tinggi tidak dapat dijadikan alasan yang tepat bagi seseorang untuk menghindari membayar pajak.

Setiap pernyataan memiliki perbedaan jumlah rata-rata yang tidak terlalu jauh antara pernyataan satu dan lainnya dari ke 15 pernyataan yang ada, terbukti hanya selisih kecil saja, sehingga dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa tidak ada pernyataan yang mengungguli pernyataan lainnya secara signifikan dari para responden.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Suatu pernyataan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0.05. Hasil uji validitas pada 15 pernyataan dapat dilihat pada tabel 3 (lampiran). Berdasarkan tabel 3 (lampiran) dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan

berada pada tingkat signifikansi dibawah 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan yang berjumlah 121 tersebut adalah valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0.60 (Ghozali, 2009). Pengujian yang dilakukan menggunakan pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner. Berdasarkan tabel 4 (lampiran), hasil pengujian 15 pernyataan diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.936. Nilai tersebut lebih besar dari 0.60 ($0.936 > 0.60$) maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap 15 pernyataan dikatakan reliabel.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dilakukan untuk mengetahui jenis alat statistik yang akan digunakan untuk melakukan uji beda statistik parametris atau non parametris pada penelitian ini. Jika data terdistribusi normal maka alat uji beda yang digunakan adalah *Independent Sample T-test* dan jika ada data yang tidak terdistribusi dengan normal maka alat uji beda yang digunakan adalah *Mann-Whitney*. Dari hasil pengujian normalitas data yang menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila *Asymp.Sig.(2-tailed)* diatas 0.05. Pada penelitian ini nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* adalah 0.510 ($0.510 > 0.05$), jadi alat uji beda yang digunakan adalah *Independent Sample T-test*.

Analisis Data

Uji Beda Parametris

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji parametris, yaitu *Independent Sample*

T-test dengan menggunakan program SPSS 20.00. Uji beda ini digunakan untuk menguji perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Dari hasil output SPSS yang pertama pada tabel 6 (lampiran) ini, kita dapat melihat bahwa akumulasi rata-rata (*mean*) untuk mahasiswa akuntansi program S1 adalah 35.91 dengan jumlah 70 responden dan untuk mahasiswa akuntansi program S2 adalah 36.90 dengan jumlah 51 responden. Berdasarkan hasil dari akumulasi rata-rata (*mean*) diatas maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa akuntansi program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi program S2, atau mahasiswa akuntansi program S1 lebih menentang penggelapan pajak dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi program S2, walaupun perbedaannya tidak signifikan. Hal ini kemungkinan dikarenakan mahasiswa akuntansi program S2 yang sebagian besar sudah bekerja lebih banyak pengeluarannya selain untuk keperluan sehari-hari juga untuk membiayai keperluan studinya. Atau mungkin dikarenakan mahasiswa akuntansi program S2 yang mana sebagian besar merupakan wajib pajak belum merasakan dampak yang signifikan atas pajak yang telah mereka setorkan, sehingga pada dasarnya ada kecenderungan untuk mendukung penggelapan pajak agar tidak merasa dirugikan oleh pemerintah dan dapat lebih banyak menikmati hasil dari gaji yang didapatkannya.

Mahasiswa akuntansi program S1 memilih alasan dalam penggelapan pajak yang paling disetujui ialah pada pernyataan 7, yaitu penggelapan pajak dibenarkan atau dipandang etis ketika otoritas pajak yang ada kurang memadai (nilai rata-rata 2.657), sedangkan menurut pandangan mahasiswa akuntansi program S2 yang lebih dipilih sebagai alasan untuk penggelapan pajak ialah pada pernyataan 12 (nilai rata-rata 2.843), yaitu penggelapan pajak adalah etis, jika seseorang tidak mampu untuk membayar pajak. Menurut mahasiswa akuntansi program S1 penggelapan pajak dianggap paling tidak etis atau

tidak dapat dibenarkan jika hanya orang lain melakukannya (dengan nilai rata-rata terendah yaitu 2.114), sama halnya dengan mahasiswa akuntansi program S2 yang menganggap penggelapan pajak paling tidak etis ketika kita melakukan penggelapan pajak jika orang lain juga melakukannya.

Perbedaan kedua pandangan tersebut masih belum bisa membuktikan bahwa ada perbedaan antara perspektif penggelapan pajak dari kedua sampel penelitian tersebut pertama dikarenakan perbedaan tersebut belum dilakukan uji statistik dan kedua karena antara kedua perbedaan tersebut hanya memiliki selisih yang sangat kecil sehingga belum diketahui apakah beda itu dapat dinyatakan sebagai beda perspektif yang sesungguhnya.

Terdapat dua tahapan analisis yang harus dilakukan, pertama kita akan menguji dahulu asumsi apakah *variance* kedua sampel tersebut sama (*equal variance assumed*) atau memiliki *variance* yang tidak sama (*equal variance not assumed*) dengan melihat *Levene's Test*.

Terlihat pada tabel 7 (lampiran) bahwa F hitung *Levene's Test* sebesar 0.573 dengan probabilitas 0.450, karena probabilitas lebih besar dari 0.05 maka kita dapat berasumsi bahwa kelompok mempunyai perbedaan sama atau mempunyai kesamaan *variance* (homogenitas) yaitu varians persepsi mahasiswa akuntansi program S1 mengenai penggelapan pajak sama dengan persepsi mahasiswa akuntansi program S2 mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan tabel 7 (lampiran) terlihat bahwa t_{hitung} untuk persepsi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan *Equal Variance Assumed* adalah -0.398 dengan signifikansi 0.691. Karena signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.691 > 0.05$) maka H_a ditolak atau tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa

akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai penggelapan pajak. Baik mahasiswa akuntansi program S1 maupun mahasiswa akuntansi program S2 sama-sama menganggap bahwa penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Penelitian ini mendukung penelitian McGee. Et. al., (2008) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai penggelapan pajak antara mahasiswa bisnis di Hongkong dan mahasiswa bisnis di Amerika Serikat, baik mahasiswa bisnis di Hongkong maupun di Amerika Serikat menganggap penggelapan pajak sebagai sesuatu yang tidak etis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hal ini sesuai dengan penelitian Ross dan McGee (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak membuat perbedaan dalam persepsi mengenai penggelapan pajak. Berbeda dengan McGee. et. al., (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam pandangan mengenai penggelapan pajak.

PENUTUP

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi Program S1 dan mahasiswa akuntansi Program S2 mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji *Independent Sample T-test* terlihat bahwa t_{hitung} untuk persepsi mengenai penggelapan pajak dengan *Equal Variance Assumed* adalah -0.398 dengan signifikansi 0.691. Karena signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.691 > 0.05$) maka H_a ditolak atau tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 mengenai penggelapan pajak.
2. Berdasarkan analisis deskriptif tidak terdapat perbedaan antara persepsi

mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2. Namun mahasiswa akuntansi program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi Program S2, walaupun perbedaan tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil output SPSS. Pada hasil output mahasiswa akuntansi program S1 memiliki akumulasi nilai rata-rata sebesar 35.91, sedangkan hasil output mahasiswa akuntansi program S2 memiliki akumulasi nilai rata-rata 36.90.

Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini, yang pertama bahwa dari hasil jawaban yang diberikan oleh 121 responden yang menjadi sampel penelitian dapat diketahui bahwa, baik mahasiswa akuntansi program S1 maupun mahasiswa akuntansi program S2 memiliki persepsi yang sama terhadap penggelapan pajak. Namun etis atau tidaknya persepsi responden disini hanya berfungsi sebagai penilai terhadap suatu perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dinilai baik, buruk, beretika atau tidak.

Implikasi kedua, bahwa jawaban yang diberikan responden mengindikasikan bahwa pada dasarnya penggelapan pajak merupakan suatu hal yang terkadang dapat dibenarkan atau tidak dibenarkan untuk dilakukan tergantung dari sikap dan sifat setiap individu serta kondisi yang melatarbelakanginya. Persepsi responden ini dapat dijadikan masukan yang penting bagi para instansi pajak terkait mengenai alasan atau faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah sampel mahasiswa akuntansi Program S2 dalam penelitian ini hanya menyertakan 51 orang dari tiga Universitas di Jakarta.
2. Peneliti menggunakan metode penyebaran kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Adapun

kelemahan dalam metode ini adalah adanya kemungkinan responden tidak serius memberikan jawaban.

3. Kuesioner yang masih cukup sulit untuk dipahami karena kuesioner penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya di luar negeri, sehingga jawaban yang diberikan tidak jujur, baik karena disengaja atau salah menafsirkan pernyataan yang terdapat dikuesioner.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan penelitian yang telah dilakukan, maka berikut ini disampaikan saran-saran untuk berbagai pihak yang memerlukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah responden dan jumlah universitas lebih banyak lagi, khususnya bagi mahasiswa akuntansi program S2 agar dapat mewakili secara keseluruhan (generalisasi) dan mendapatkan hasil yang lebih akurat atau dapat mengganti responden.
2. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan membuat item-item pernyataan sendiri yang dikembangkan dari indikator penelitian sebelumnya agar sesuai dengan permasalahan dan kondisi di lapangan.
3. Aparat pajak hendaknya mengkaji beberapa pernyataan yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti dkk, "Perbedaan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi yang Sudah Bekerja dan yang Belum Bekerja Terhadap Praktik Earnings Management", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 13, No. 2, 2011.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, "Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu", Kencana, Jakarta, 2006.
- Efendi, Muhammad Bakhrun, "Kebijakan Perpajakan di

- Indonesia”, Alinea Pustaka, Yogyakarta, 2006.
- Firdaus, Edwin, “Mafia Pajak Jilid II: Orang Pajak Lecehkan Masyarakat”, Diakses melalui: <http://www.tribunnews.com/2012/06/11/miing-orang-pajak-lecehkan-masyarakat>, Pada tanggal: 15 November 2012.
- Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
<http://www.pajak.go.id>
- Hutami, Sri, “Tax Planning (Tax Avoidance Dan Tax Evasion) Dilihat dari Teori Etika”, Majalah Online Politeknosains 2012, Diakses melalui: <http://ejournal.politama.ac.id/index.php/politeknosains/article/view/25>, Pada tanggal: 22 Desember 2012.
- Ika, “Kepala KPP Wonosari Raih Doktor Usai Teliti Penggelapan Pajak”, Diakses melalui: <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4561>, Pada tanggal: 15 November 2012
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen”, BPFE, Yogyakarta, 2002.
- Kirchler, Erich, Boris Maciejovsky & Friedrich Schneider, “Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter?”, SSRN, 2001.
- Lasmana, Mienati Somya dan Heru Tjaraka, “Pengaruh Moderasi Sosio Demografi Terhadap Hubungan Antara Moral-Etika Pajak Dan Tax Avoidance Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Surabaya”, *Majalah Ekonomi*, Tahun XXI, No. 2, 2011.
- Mahardika, Teguh, “Tiga PNS Banten Gelapkan Pajak BBNKB Rp1,6M”, Diakses melalui: <http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/content/view/532719/> Pada tanggal: 17 November 2012.
- Mardiasmo, “Perpajakan”, Penerbit Andi. Yogyakarta, 2009.
- Marsono, Budi, “Etika Bisnis: Kasus Pajak Grup Bakrie”, Diakses melalui: <http://marsonos.blogspot.com/2011/11/etika-bisnis-kasus-pajak-grup-bakrie.html>, Pada tanggal: 15 November 2012.
- Martadi, Indiana Farid dan Sri Suranta, “Persepsi Akuntan, Mahasiswa Akutansi, Dan Karyawan Bagian Akutansi Dipandang Dari Segi Gender Terhadap Etika Bisnis Dan Etika Profesi”, *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, 2006.
- McGee, Robert W., “Is Tax Evasion Unethical”, *Kansas Law Review*, Volume 42 No. 2, USA, 1994.
- McGee, Robert W., Khaled Salmen Aljaaidi, dan Anwar Salem Musaibah, “The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences Students in Yemen”, *International Journal of Business and Management*, Volume 7, Number 16, 2012.
- McGee, Robert W. & Ranjana Gupta, “The Ethics of Tax Evasion: An Empirical Study of New Zealand Opinion”, *Working Paper Florida International University Chapman*

- Graduate School of Business, SSRN, 2008.
- McGee, Robert W., Simon S. M. Ho & Annie Y. S. Li, "A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States", *Journal of Business Ethics*, 2008.
- Meliala, Tulis S., "Mengapa Masyarakat Enggan Membayar Pajak?", *Bina Ekonomika Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, Volume 11, Nomor 1, 2007.
- Mughal, Muhammad Muazzam & Muhammad Akram, "Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan", *Journal of Economic and Behavioral Studies*, Volume 4, 2012.
- Nickerson, Inge, Larry Pleshko & Robert W. McGee, "Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 15, Number 1, 2009.
- Resmi, Siti, "Perpajakan Teori dan Kasus", Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Ross, Adriana M. & Robert W. McGee, "Education Level and Ethical Attitude Toward Tax Evasion: A Six-Country Study". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 15, Number 2, 2012.
- Santosa, Purbayu Budi dan Ashari, "Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.
- Saputra, Andi, "MA Vonis Kasus Penggelapan Pajak Asian Agri Bayar Rp 2,5T Ke Negara", Diakses melalui: <http://news.detik.com/read/2012/12/28/094058/2128520/10/ma-vonis-kasus-penggelapan-pajak-asian-agri-bayar-rp-25-t-ke-negara>, Pada tanggal: 25 Maret 2013.
- Schiffman, Leon G. & Leslie Lazar Kanuk, "Perilaku Konsumen", Gramedia, Jakarta, 2004.
- Shadani, Djazoeli, "Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak", Diakses melalui: <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=330>, Pada tanggal: 18 November 2012.
- Shaleh, Abdul Rahman, "Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam", Kencana, Jakarta, 2009.
- Siahaan, Marihot Pahala, "Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Soemarso, "Perpajakan: Pendekatan Komprehensif", Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Suandy, Erly, "Hukum Pajak", Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Syofyan, Syofrin, "Penetapan Pajak (Dalam Kerangka Mencari Sistem yang Kondusif)", *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 2003.
- Thohari, A. Ahsin, "Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2011.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta, 2003.

Lampiran

Tabel 1
Data Sampel Penelitian

Keterangan	Mahasiswa Akuntansi Program S1		Mahasiswa Program Magister Akuntansi (S2)	
	Jumlah	Presentase	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar dan kembali	70	100%	51	100%
Kuesioner yang diolah	70	100%	51	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 2
Tabel Urutan Pernyataan

Ranking	Pernyataan	Nilai rata-rata
1	Penggelapan pajak adalah etis, jika orang lain melakukannya.	2.099
2	Penggelapan pajak adalah etis, jika tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi.	2.132
3	Penggelapan pajak adalah etis, jika sebagian besar pajak digunakan untuk proyek yang tidak memberikan keuntungan bagi saya.	2.223
4	Penggelapan pajak adalah etis, bahkan, jika pengenaan tarif pajak tidak terlalu tinggi tetapi pemerintah tidak memberitahukan jenis dari pajak yang dikenakan (pajak atas apa).	2.231
5	Penggelapan pajak adalah etis, jika kemungkinan resiko untuk ditangkap/dipenjarakan atas tindakan tersebut kecil.	2.231
6	Penggelapan pajak adalah etis, jika saya tidak memiliki kemampuan untuk menghitung jumlah pajak yang disetorkan.	2.413
7	Penggelapan pajak adalah etis, jika pemerintah mendiskriminasi saya karena agama, ras, dan latar belakang etnis/budaya.	2.479
8	Penggelapan pajak adalah etis, jika pajak digunakan untuk mendukung sebuah perang yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan.	2.488
9	Penggelapan pajak adalah etis, jika penegak hukum yang ada belum memadai dalam menangani kasus pajak yang terjadi.	2.504
10	Penggelapan pajak adalah etis, jika secara signifikan sebagian besar pajak yang disetorkan dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	2.512
11	Penggelapan pajak adalah etis, jika petugas pajak tidak memiliki moralitas pajak yang baik, sehingga mendukung adanya penggelapan pajak.	2.521
12	Penggelapan pajak adalah etis, jika sebagian besar porsi dari pajak yang dikumpulkan dipergunakan secara tidak merata, misalnya masih banyak daerah-	2.603

	daerah yang tidak merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak.	
13	Penggelapan pajak adalah etis, jika saya tidak mampu untuk membayar pajak.	2.603
14	Penggelapan pajak adalah etis, jika otoritas pajak yang ada kurang memadai.	2.628
15	Penggelapan pajak adalah etis, jika sistem pajak berjalan dengan tidak adil dan tidak efisien.	2.661

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Pernyataan	Sig.	Pearson Correlation	Keterangan
Pernyataan-1	0.000	0.631	Valid
Pernyataan-2	0.000	0.707	Valid
Pernyataan-3	0.000	0.793	Valid
Pernyataan-4	0.000	0.696	Valid
Pernyataan-5	0.000	0.725	Valid
Pernyataan-6	0.000	0.716	Valid
Pernyataan-7	0.000	0.725	Valid
Pernyataan-8	0.000	0.737	Valid
Pernyataan-9	0.000	0.720	Valid
Pernyataan-10	0.000	0.678	Valid
Pernyataan-11	0.000	0.801	Valid
Pernyataan-12	0.000	0.672	Valid
Pernyataan-13	0.000	0.757	Valid
Pernyataan-14	0.000	0.760	Valid
Pernyataan-15	0.000	0.796	Valid

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.936	.937	15

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

		Total
N		121
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	53.69
	Std. Deviation	13.421
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.056
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.817
Asymp. Sig. (2-tailed)		.517

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 6. Hasil SPSS (1) Group Statistics

Group	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Total 1	70	35.91	13.134	1.570
2	51	36.90	13.907	1.947

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 7. Hasil SPSS (2)**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Total	Equal variances assumed	.573	.450	-.398	119	.691	-.988	2.479	-5.896	3.921
	Equal variances not assumed			-.395	104.210	.694	-.988	2.501	-5.948	3.973